



Kunjungan BPK Perwakilan Kalbar ke Redaksi Pontianak Post

## Opini WTP Bisa Saja Turun, Tergantung

### Kondisi Saat Diperiksa

Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Kalimantan Barat mencatat semua pemerintah daerah memperoleh opini wajar tanpa pengecualian atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah tahun 2023.

**RAMSES TOBING, Pontianak**

**PEMERINTAH** daerah yang baru mendapat opini wajar tanpa pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun ini yakni Bengkayang. Sebelumnya sejak tahun 2019 Bengkayang mendapat opini wajar dengan pengecualian (WDP).

"Terakhir itu Bengkayang

sebelumnya WDP terus, dan sekarang sudah WTP," kata Kepala Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Kalimantan Barat Wahyu Priyono saat berdiskusi dengan jajarannya Redaksi *Pontianak Post*, Rabu (4/10).

Wahyu juga menyebutkan Kayong Utara juga mendapat

WDP sebanyak tiga kali sejak tahun 2019. Baru kemudian di tahun 2022 dan 2023 mendapat opini wajar tanpa pengecualian atas laporan keuangan pemerintah daerah.

Lalu dalam catatan BPK pemerintah daerah lainnya yang mendapat opini wajar dengan pengecualian (WDP) di tahun 2019, Kalimantan Barat, dan Melawi.

"Memang tidak ada jaminan pemda itu WTP terus. Bisa saja turun tergantung kondisi laporan atau pengelolaan keuangan saat diperiksa," tambah Wahyu.

◆ Ke Halaman 5 kolom 1



RED PONTIANAKPOST

**KUNJUNGAN:** Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Kalbar saat berkunjung ke Redaksi Pontianak Post, Rabu (4/10).





## Opini WTP Bisa Saja Turun, Tergantung Kondisi Saat Diperiksa

Sambungan dari halaman 9

Wahyu menyampaikan pemeriksaan yang dilakukan BPK ada tiga. Pemeriksaan keuangan, yakni pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah daerah. Pemeriksaan keuangan ini dilakukan untuk melihat kesesuaian penyajian laporan dengan peraturan dan perundang-undangan.

"Apakah sudah disajikan secara wajar maka pemeriksaan laporan keuangan itu dilakukan," imbuh Wahyu.

Lalu pemeriksaan kinerja yakni pemeriksaan tematik untuk menilai aspek ekonomis, efektivitas dan efisiensi. Pemeriksaan ini dilakukan pada program yang langsung

menyentuh masyarakat. Seperti program layanan pendidikan, kesehatan dan perizinan.

Wahyu menambahkan hasil akhir dari pemeriksaan ini berupa rekomendasi jika ada yang harus diperbaiki. "Sekarang kami sedang melakukan pemeriksaan terhadap program layanan kesehatan, bagaimana upaya pemerintah menurunkan angka stunting karena angkanya di Kalbar masih tinggi. Sampelnya di beberapa kabupaten. Landak, Melawi dan kayong Utara," terang Wahyu.

Selanjutnya pemeriksaan dengan tujuan tertentu (DTT). Ini merupakan pemeriksaan kepatuhan dan investigatif. Sebagai contoh terkait

dengan belanja daerah, pendapatan daerah, operasional rumah sakit, BLUD maupun BUMD.

"Kalau pemeriksaan investigatif harus ada informasi awal terkait dengan terjadinya kerugian daerah atau negara disebabkan kelalaian atau perbuatan melawan hukum. Jika dari pemeriksaan laporan keuangan, belanja, atau kinerja dan ditemukan ada indikasi kerugian negara baru dilanjutkan dengan pemeriksaan investigatif," imbuh Wahyu.

Wahyu menyebutkan bahwa entitas pemeriksaan pemerintah daerah di Kalbar terdiri 15 yakni 1 pemerintah provinsi, 2 kota madya dan 12 kabupaten. Lalu BUMD ada 25

antara lain BPD, PDAM, BPR dan PD. Lalu 132 BLUD. Rinciannya RSUD, Puskesmas, Labkesda, dan Balai Kesehatan.

Lebih lanjut disampaikan Wahyu, kunjungan ke media merupakan bagian dari sosialisasi agar masyarakat memahami capaian-capaian dari BPK. Kunjungan ini menurutnya menjadi literasi secara umum apa itu BPK kepada publik.

"Visit media ini rutin kami lakukan untuk mensinkronkan apa yang telah dilakukan sehingga masyarakat bisa tahu hasil pemeriksaan BPK seperti apa. Karena kami juga memiliki fungsi pelayanan, dan keterbukaan informasi publik," pungkas Wahyu. (\*)